

---

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Nailis Safaah<sup>1</sup>, Zulfia Syani<sup>2</sup>, Fajaryant Aprilianto<sup>3</sup>, Saiful Anwar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: Nailissafaah@gmail.com<sup>1</sup>, Zulfisyani28@gmail.com<sup>2</sup>, fajaryantaprilianto@gmail.com<sup>3</sup>, saifulanwarmieta@iainsalatiga.ac.id<sup>4</sup>

---

### Article History:

Received: 23 Maret 2022

Revised: 01 April 2022

Accepted: 12 April 2022

**Keywords:** PAD, DBH, JP, BD

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Daerah (BD) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Populasi dari penelitian ini yakni delapan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian secara simultan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat agar lebih memaksimalkan potensi sumber daya yang ada guna meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan penduduk sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat.

---

### PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah telah diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan tersebut bertujuan agar tercipta kemandirian otonomi dalam lingkup daerah dan implikasinya adalah terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Martani & Fazri, 2011). Pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien (Devita et al., 2014). Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah lebih memahami potensi, kondisi, maupun problematika yang ada pada daerah otonom.

Onofrei & Florin (2017) menggaris bawahi bahwasanya desentralisasi tidak dapat ditafsirkan sebagai tujuan reformasi konstitusi dan administrasi, melainkan untuk meningkatkan fungsi suatu negara dan lebih adilnya sumber daya diantara pemerintah daerah (Bahl & Sally, 2006). Lebih jauh,

Yuang Jin dan Mark Rider, menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mendorong peningkatan efisiensi alokatif sektor publik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Jin & Mark, 2020). Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Elsy (2013) dalam menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah, hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang melimpah sumber daya alam dan sebagai pusat bisnis dibandingkan dengan daerah yang sumber daya alamnya sedikit dan bukan pusat bisnis. Perekonomian daerah dapat memperoleh manfaat yang lebih baik jika dalam pembuatan kebijakan dalam hal ini desentralisasi untuk mengurangi jumlah dana yang telah diarahkan melalui saluran anggaran pemerintah (Krinichansky & Bruno, 2019).

Kewenangan atau desentralisasi yang dimiliki suatu daerah tentunya memerlukan sebuah anggaran. Anggaran menjadi fundamental dalam penyusunan perencanaan, koordinasi, serta pengendalian oleh suatu organisasi maupun perusahaan (Mooy & Yuliasuti, 2019). Untuk memperlancar jalannya perencanaan tersebut, pemerintah menyusun anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu rencana belanja daerah yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Dewi et al., 2017). Secara umum, APBD dan APBN meliputi dua unsur yaitu pendapatan dan belanja. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen terpenting dalam kelangsungan pemerintahan sebab menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah (Rusmita, 2016). Belanja daerah penting untuk ditelaah untuk dapat diketahui permasalahan dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Fenomena belanja daerah juga pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2013. Hal ini diungkapkan oleh Inayati & Doddy (2017), bahwa pada tahun tersebut terjadi fenomena belanja daerah lebih besar terhadap transfer yang berimbas pada ketidakefektifan pengeluaran daerah dari segi pembiayaan. Lebih jauh, belanja daerah memiliki korelasi positif terhadap perekonomian, artinya semakin tinggi belanja daerah maka semakin maju pula perekonomian di daerah tersebut.

Sebagai organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang tidak berorientasi pada laba (Andarsari, 2016). Pemerintah Daerah berperan sebagai lembaga pelayanan publik. APBD yang telah dianggarkan untuk belanja dalam rangka pembangunan dan peningkatan layanan fasilitas-fasilitas publik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan munculnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat daerah (Putra & Dwirandra, 2015). Anggaran belanja yang semakin meningkat tentunya membutuhkan dana yang besar pula supaya hajat otonomi daerah dapat dipenuhi. Belanja daerah dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat umum dengan memanfaatkan berbagai pemasukan meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH). Kemudian belanja daerah juga dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk (JP).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan suatu daerah dari berbagai jenis usaha pemerintah daerah dalam mengumpulkan sumber dana untuk membiayai kegiatan dan keperluan di daerah tersebut yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya (Ferdiansyah et al., 2018). UU no 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang dipungut dan didasarkan pada peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui PAD, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimilikinya dan menggali potensi-potensi PAD di masing-masing daerah (Nasir, 2019). Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga mendorong pemerintah daerah lebih akuntabel (Mooy & Yuliasuti, 2019). Sumawan & I Made (2016) mengatakan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi berbanding positif terhadap sumber keuangan yang dimiliki daerah. Secara teoritis, pendapatan asli daerah berpengaruh pada tingkat tinggi rendahnya belanja daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang

dilakukan oleh Dewi et al (2017) ; Putri et al (2020) yang menyimpulkan bahwasanya pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Putra & Dwirandra (2015) dan Devita et al (2014), pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat belanja daerah. Tetapi Amalia et al (2015) dan Rusmita (2016) dalam temuannya menunjukkan tidak adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat belanja daerah.

Dalam roda perekonomian, pemerintah daerah mendapatkan modal dari potensi yang ada di daerah dan transfer dari pemerintah pusat atau biasa disebut dengan istilah dana perimbangan (Kusuma, 2013). Dalam penelitian ini, jenis dana perimbangan yang digunakan ialah Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu salah satu komponen dari dana perimbangan. Dana perimbangan ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang didistribusikan ke daerah untuk mendanai hajat daerah dalam ranah desentralisasi (Dewi et al., 2017). Tujuan dari dana perimbangan yakni untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana bagi hasil berasal dari pendapatan pajak maupun non pajak oleh daerah dan pusat (Masdjojo, N & Sukartono, 2009). Adapun yang berasal dari pajak diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) tepatnya pada Pasal 25, Pasal 29 serta PPh Pasal 21. Sedangkan yang berasal dari non pajak atau sumber daya alam diperoleh dari hasil kehutanan, perikanan, dan pertambangan yang meliputi pertambangan umum, gas bumi, minyak bumi, dan panas bumi.

Dalam laporan APBD, terdapat hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal ini, Ernayani (2017) dalam risetnya menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Masdjojo, N & Sukartono (2009) dan Putra & Dwirandra (2015) mengenai dana bagi hasil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah. Lain halnya dengan Dewi et al (2017), dalam penelitiannya menunjukkan tidak adanya pengaruh dana bagi hasil terhadap tingkat belanja daerah. Fenomena tentang dana bagi hasil juga terjadi di Leningrad, salah satu negara bagian di Rusia, pajak bagi hasil tidak didistribusikan untuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah (Bahl & Sally, 2006).

Jumlah Penduduk (JP) bagi perencanaan pembangunan menjadi aset dasar apabila mampu meningkatkan produktivitas dan keterampilannya serta dapat menjadi beban apabila tingkat produksi rendah (Devita et al., 2014). Hardati (2013), penduduk ialah keseluruhan penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan telah diakui baik secara *de facto* maupun *de jure*. Setidaknya ada tiga sumber yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui jumlah penduduk yaitu dengan registrasi penduduk, sensus penduduk dan survei khusus penduduk (Mantra, 2003). Beberapa sumber mengaitkan bahwa jumlah penduduk erat hubungannya dengan belanja daerah. Temuan dari Putri et al (2020) mengungkapkan bahwa Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan penelitian dari Devita et al (2014) menghasilkan kesimpulan bahwa Belanja Daerah tidak dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk.

## **LANDASAN TEORI**

### **Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada periode tertentu dan terdiri dari tiga komponen pokok, yakni unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan (Rahmawati, 2010). Selanjutnya, Rahmawati (2010) juga menyatakan bahwa pengukuran Belanja Daerah dapat dilakukan dengan perhitungan menjumlahkan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kemudian belanja langsung dapat dihitung dengan penjumlahan Belanja Pegawai,

---

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah dengan menjumlahkan komponen belanja tidak langsung yang meliputi, Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan serta Belanja Tak Terduga.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU no 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah tentunya harus dioptimalkan supaya terhindar dari permasalahan yang tak terduga. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat (Tahar & Maulida, 2011). Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan menjumlahkan Total pajak daerah, total retribusi daerah, total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al (2017) ; Putri et al (2020) ; Mooy & Yuliastuti (2019) ; Ernayani (2017), mengungkapkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Belanja Daerah (BD) secara positif. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka diperoleh hipotesis yaitu PAD berpengaruh positif terhadap BD.

### **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil merupakan komponen dari Dana Perimbangan yang berasal dari transfer pemerintah berupa pajak maupun non pajak yaitu sumber daya alam daerah tersebut. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil dapat diketahui dari hasil penjumlahan antara Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil memiliki hubungan erat dengan Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan DBH dapat dialokasikan untuk pembangunan otonomi daerah dan tentunya berkaitan erat dengan belanja daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan Temuan oleh Ernayani (2017) ; Putra & Dwirandra (2015); Masdjojo, N & Sukartono (2009) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Belanja Daerah (BD). Berdasarkan penelitian tersebut, maka diperoleh hipotesis, yaitu DBH berpengaruh positif terhadap BD.

### **Jumlah Penduduk**

Penduduk adalah orang yang berdomisili pada suatu wilayah geografis dalam waktu enam bulan atau lebih dan atau berdomisili kurang dari enam bulan namun memiliki maksud untuk menetap (Sudarsono, 2016). Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus penduduk. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Putri et al (2020) dan Mooy & Yuliastuti (2019), menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah (BD). Berdasarkan penelitian tersebut, maka diperoleh hipotesis yaitu JP berpengaruh positif terhadap BD

## **METODE PENELITIAN**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan APBD dan berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran, serta data jumlah penduduk delapan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dalam rentang waktu 2015-2019. Data-data tersebut diperoleh dari instansi terkait dan literatur yang relevan yaitu PPID pusat (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Populasi merupakan jumlah subjek atau objek yang diteliti dan mempunyai karakteristik

tertentu (Rusmita, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan realisasi APBD 8 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan sampel ialah bagian dari jumlah populasi yang dipilih (Amirullah, 2015). Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling* yang mana populasi digunakan ialah yang sesuai dengan pertimbangan dan tujuan penelitian (Rasyid, 2018). Teknik ini diambil dikarenakan tidak semua daerah populasi memiliki laporan secara lengkap pada kurun waktu yang ditentukan dalam model penelitian. Jumlah sampel penelitian yakni delapan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dengan rentang waktu 2015-2019, meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, serta Kabupaten Kapuas Hulu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu Analisis kuantitatif, teknik analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan data *time series* dan *cross section* yang terdiri dari banyak obyek pada kurun waktu (Ahmaddien & Bambang, 2020). Kemudian data tersebut dianalisis tentang kaitannya hubungan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Suryowati, 2016) untuk mengetahui tingkat signifikansi (Sarwono, 2011) dengan taraf signifikansi 5%. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai probabilitas > 5% maka dapat dikatakan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel yang dianalisis. Sebaliknya, apabila hasil analisis menunjukkan nilai probabilitas < 5% maka dapat dikatakan ada pengaruh signifikan antara variabel yang dianalisis. Adapun pengujian yang dilakukan meliputi Uji Statistik Deskriptif, Uji Stasioneritas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-masing variabel. Pada riset ini, jumlah data yang digunakan sebanyak 40 sampel kabupaten/kota di Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2015-2019. Berikut hasil uji statistik deskriptif:

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	PAD	DBH	JP	BD
Mean	1.05E+11	4.59E+10	377098.1	1.28E+12
Median	9.31E+10	3.36E+10	386848.5	1.31E+12
Maximum	2.41E+11	1.48E+11	535725.0	1.96E+12
Minimum	3.95E+10	1.48E+10	238611.0	8.28E+11
Std. Dev.	4.93E+10	3.23E+10	108056.6	2.97E+11
Skewness	0.843692	1.742572	0.005046	0.122271
Kurtosis	3.102061	5.381328	1.459558	2.183958
Jarque-Bera	4.762801	29.69493	3.955106	1.209540
Probability	0.092421	0.000000	0.138408	0.546200
Sum	4.19E+12	1.83E+12	15083925	5.11E+13

Sum Sq. Dev.	9.46E+22	4.06E+22	4.55E+11	3.45E+24
Observations	40	40	40	40

Sumber: Data diolah (2021)

Menilik dari tabel di atas, diperoleh hasil nilai rata-rata variabel dependen (BD) Rp1.277.774.855.049,25, nilai maksimum dan minimum masing-masing Rp 1.956.565.070.669,85 dan Rp 828.396.911.368,56. Nilai maksimum belanja daerah terdapat di Kabupaten Ketapang pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena dana pada daerah tersebut difokuskan pada bidang pembangunan daerah. Sedangkan nilai minimal dipegang oleh Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019. Rendahnya belanja daerah pada kabupaten ini disebabkan karena jumlah penduduk yang tidak terlalu tinggi dengan daerah yang tidak tergolong luas sehingga belanja daerah tidak dapat terdistribusikan dengan besar.

Selanjutnya, untuk variabel PAD rata-ratanya bernilai Rp 205.703.975.906,95 dengan nilai tertinggi Rp 240.581.936.653,27 oleh Kabupaten Sintang tahun 2018 dan mengindikasikan bahwa kemandirian ekonomi pada daerah ini sangat tinggi. Sedangkan nilai terendah dipegang oleh Kabupaten Bengkayang tepatnya pada tahun 2015 yakni sebesar Rp 39.464.149.235,07. Hal ini disebabkan karena adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya. Diharapkan, daerah ini mampu menggali sumber daya yang ada di dalamnya guna meningkatkan PAD daerah tersebut.

Kemudian variabel DBH diketahui secara runtut nilai rata-rata, nilai maksimal dan minimal sebesar Rp 45.851.663.404,63, Rp 148.397.055,963 Rp 14.774.079,625. Nilai maksimal DBH terdapat di Kabupaten Ketapang tahun 2015 yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, daerah ini masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Sedangkan nilai minimal terdapat di Kabupaten Mempawah tepatnya pada tahun 2019. Dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu tinggi, daerah ini bisa mandiri dalam membiayai pembangunan otonomi daerah.

Terakhir nilai rata-rata variabel JP sebanyak 377.098,13, nilai maksimal 535.725,00 dan nilai minimal 238.611,00. Jumlah penduduk di Kalimantan Barat yang terendah terdapat di daerah bengkayan pada tahun 2015 yaitu berjumlah 238.611 jiwa dan daerah dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu daerah Sambas tahun 2019 dengan jumlah penduduk 535.725 jiwa. Tinggi rendahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya sendiri.

### Uji Stasioneritas

Stasioner merupakan salah satu upaya untuk menghindari *spuorius regression* (Rizkiyanti, 2016). Sebuah data dapat dikatakan stasioner apabila memiliki nilai rata-rata, ragam konstan secara runtut, dan kovarian antar data hanya bergantung pada kelambanan kedua periode tersebut (Setyowati, 2014). Uji stasioneritas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji unit root Levin, Lin & Chu (LLC) untuk pengujian secara menyeluruh (Ramadhani & Theresia, 2020). Adapun stasioneritas data dapat dilihat dari nilai probabilitas  $< \alpha=0,5$ . Jika data yang digunakan ada yang tidak stasioner, maka perlu dicek kembali validitas dan kestabilannya.

**Tabel 2. Hasil Uji Stasioneritas**

No	Variabel	Prob.*	Keterangan
1	Belanja Daerah (Y)	0,0000	Data Stasioner
2	Pendapatan Asli Daerah (X1)	0,0147	Data Stasioner

3	Dana Bagi Hasil (X2)	0,0000	Data Stasioner
4	Jumlah Penduduk (X3)	0,000	Data Stasioner

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 2 menunjukkan hasil stasioneritas untuk variabel Y (Belanja Daerah) dengan nilai *probability* 0,0000 lebih besar dari  $\alpha=0,05$  maka dapat dikatakan bahwa variabel Y memiliki data yang stasioner. Selanjutnya, variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) ditunjukkan pada tabel 3 memiliki nilai probabilitas  $0,0147 < \alpha=0,05$  sehingga data dapat dikatakan stasioner. Begitu halnya dengan variabel X2 (Dana Bagi Hasil) lolos uji stasioneritas, hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas yang lebih kecil dibandingkan nilai alpha ( $0,0000 < 0,05$ ). Untuk Jumlah Penduduk (X3) memperoleh nilai *probability* 0,0000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X3 lolos uji stasioner atau memiliki data yang stasioner.

### Uji Model

**Tabel 3. Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.976913	(7,29)	0.0000
Cross-section Chi-square	54.346432	7	0.0000

Sumber: Data diolah (2021)

Uji chow digunakan untuk membandingkan model regresi terbaik antara CEM dan FEM (Utami & Arif, 2018). Penentuan keputusan uji chow diambil berdasarkan nilai *cross-section chisquare*  $> \alpha=0,05$  maka CEM yang terpilih. Sebaliknya, jika nilai *cross-section chisquare*  $< \alpha=0,05$  maka FEM yang terpilih. Berdasarkan (tabel 3) dapat diketahui bahwa nilai *cross-section chisquare*  $< \alpha=0,05$ . Artinya *Fixed Effect Model* (FEM) yang terpilih dalam pengujian.

**Tabel 4. Hasil Uji Hausman**

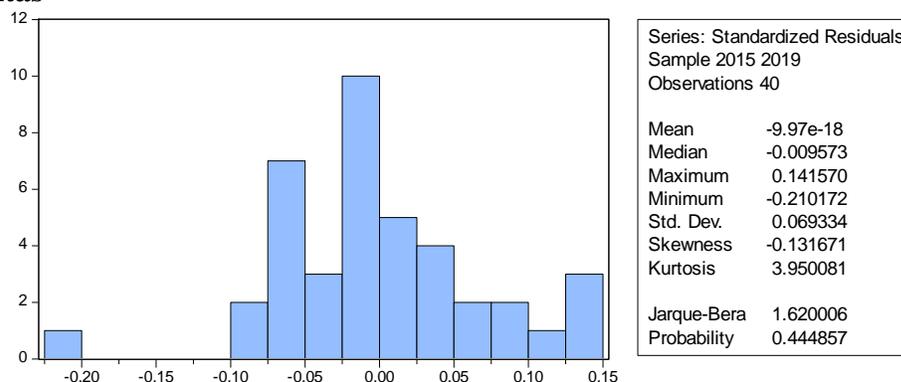
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.756604	3	0.0208

Sumber: Data diolah (2021)

Selanjutnya dilakukan uji hausman. Uji ini digunakan untuk membandingkan model regresi terbaik antara FEM dan REM (Utami & Arif, 2018). Penentuan keputusan uji hausman diambil berdasarkan nilai *cross-section random*  $> \alpha=0,05$  maka REM yang terpilih. Sebaliknya, jika nilai *cross-section random*  $< \alpha=0,05$  maka FEM yang terpilih. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *cross-section random*  $< \alpha=0,05$ . Artinya *Fixed Effect Model* (FEM) yang terpilih dalam pengujian.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas



**Gambar 1. Uji Normalitas**

Sumber: Data diolah (2021)

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel residual telah terdistribusi secara normal (Inawati et al., 2021). Hal ini dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan nilai Jarque-Bera. Berdasarkan grafik histogram pada (gambar 1) menunjukkan titik-titiknya tersebar mengikuti garis diagonalnya. Artinya data telah terdistribusi secara normal. Tetapi cara tersebut kurang kuat untuk diambil kesimpulan, maka cara selanjutnya yaitu dengan melihat nilai probabilitas dan jarque-bera. Nilai probabilitas pada uji normalitas penelitian ini adalah  $0,444857 > \alpha = 0,5$ , artinya data telah terdistribusi secara normal. Uji Jarque-Bera dilakukan dengan menggunakan data residual (Gio, 2015). Pada gambar diketahui nilai Jarque-Bera sebesar 1.620006 atau lebih besar dari nilai signifikansi  $\alpha = 0,5$ . Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi normal dan dinyatakan lulus uji normalitas.

#### Uji Multikolinearitas

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

	X3	X2	X
JP	1.000000	0.506039	0.686414
DBH	0.506039	1.000000	0.400560
PAD	0.686414	0.400560	1.000000

Sumber: Data diolah (2021)

Penelitian yang baik ialah penelitian yang terhindar dari gejala multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi korelasi antara variabel independen satu dengan lainnya (Purnomo, 2019). Apabila korelasi antar variabel independen tinggi maka dapat dikatakan terdapat masalah atau gangguan pada model regresi. Salah satu asumsi yang digunakan pada regresi linear berganda ialah asumsi tidak terdeteksi multikolinearitas (Gio, 2015). Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi. Jika nilai korelasi  $> 0,8$  antar variabel independen, maka terdeteksi terjadi multikolinieritas.

Mengacu pada (tabel 15), nilai korelasi X1 dengan X2 sebesar 0.400560. Kemudian nilai korelasi X1 dengan X3 sebesar 0.686414. Sedangkan nilai korelasi X2 dengan X3 sebesar 0.506039. Berdasarkan masing-masing nilai korelasi antar variabel independen menunjukkan

angka lebih kecil dari 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terindikasi gejala multikolinear atau dinyatakan lulus uji multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.952738	0.559534	1.702733	0.0993
PAD	-5.39E-14	3.09E-13	-0.174362	0.8628
DBH	-1.24E-12	9.13E-13	-1.361786	0.1838
JP	-2.22E-06	1.44E-06	-1.538711	0.1347

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.223867	Mean dependent var	0.051857
Adjusted R-squared	-0.043765	S.D. dependent var	0.045266
S.E. of regression	0.046246	Akaike info criterion	-3.081252
Sum squared resid	0.062023	Schwarz criterion	-2.616810
Log likelihood	72.62504	Hannan-Quinn criter.	-2.913325
F-statistic	0.836472	Durbin-Watson stat	2.520198
Prob(F-statistic)	0.598489		

Sumber: Data diolah (2021)

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian antara residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Putra & Dwirandra, 2015). Untuk mengetahui adanyaheteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser dengan melakukan regresi variabel bebas dan nilai absolut residual (Bawono & Shina, 2018). Uji Glejser melihat dari nilai probability, apabila lebih tinggi dari nilai  $\alpha=0,05$  maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan (tabel 6) dapat diamati bahwa nilai probabilitas untuk variabel X1 sebesar 0.8628, untuk X2 sebesar 0.1838 dan X3 probabilitasnya 0.1347. Dari keseluruhan nilai probabilitas yang dimiliki oleh variabel-variabel bebas menunjukkan nilai lebih besar dari  $\alpha=0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau model regresi bersifat homogen.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang digunakan dalam riset ini yaitu dengan menggunakan Durbin-Watson atau DW (Rusmita, 2016). Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi antara periode yang diujikan pada model regresi. Nilai DW pada pengujian regresi sebesar 2.037449, dL 1.3384, dU 1.6589, 4-dL 2,6616, 4-dU 2,3411. Nilai dU dan dL diperoleh dari rujukan tabel Durbin-Watson dengan k=3 dan n=40. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi dikarenakan  $dU \leq DW \leq 4-dU$ .

**Uji Hipotesis****Tabel 7. Uji Hipotesis**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	-0.029095	0.070140	-0.414814	0.6813
DBH	0.126816	0.085947	1.475511	0.1509
JP	6.48E-06	2.42E-06	2.675312	0.0121
C	23.04959	3.287852	7.010531	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.916416	Mean dependent var	27.84874	
Adjusted R-squared	0.887594	S.D. dependent var	0.239818	
S.E. of regression	0.080404	Akaike info criterion	-1.975095	
Sum squared resid	0.187478	Schwarz criterion	-1.510653	
Log likelihood	50.50189	Hannan-Quinn criter.	-1.807167	
F-statistic	31.79580	Durbin-Watson stat	2.037449	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah (2021)

**Uji R Square**

Uji R square digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Inawati et al., 2021). Mengacu pada (tabel 7) dapat diamati bahwa nilai R-squared atau  $R^2$  sebesar 0.916416 atau 91,64%. Artinya, besarnya pengaruh variabel bebas yakni pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan jumlah penduduk terhadap variabel bebas belanja daerah yakni sebesar 91,64% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terlibat dalam model penelitian. Nilai dari  $R^2$  mendekati angka 1 menunjukkan bahwa model regresi terpilih dapat memprediksi nilai variabel terikat secara sempurna.

**Uji F**

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas secara serentak atau simultan terhadap variabel terikat (Bawono & Shina, 2018). Mengacu pada di atas, nilai signifikansi  $F < \alpha$  ( $0,000000 < 0,05$ ). Maka secara simultan, ketiga variabel bebas (PAD, DBH, dan JP) berpengaruh signifikan terhadap BD.

**Uji T**

Uji T merupakan pengujian regresi secara parsial yang digunakan untuk menguji tingkat pengaruh dari setiap variasi variabel bebas terhadap variabel terikat (Ferdiansyah et al., 2018). Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas dari setiap variabel dengan  $\alpha$  0,05. Menilik pada (tabel 7), untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memperoleh nilai probabilitas sebesar  $0.6813 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Selanjutnya, untuk variabel dana bagi hasil memiliki nilai probabilitas  $0.1509 > 0,05$ . Artinya, Dana Bagi Hasil (X2) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan, untuk variabel Jumlah Penduduk (X3) nilai probabilitasnya yaitu  $0.0121 < 0,05$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah.

---

**PEMBAHASAN****Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah**

Berdasarkan olah analisis data yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa secara individual pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015-2019. Hal ini menandakan, peningkatan pendapatan asli daerah dalam kurun waktu tersebut tidak diikuti oleh kenaikan belanja daerah. Tidak signifikannya pengaruh pendapatan asli daerah dikarenakan belum optimalnya potensi kekayaan yang ada di Kalimantan Barat. Pada riset ini, pendapatan asli daerah tertinggi terdapat di Kabupaten Sintang tahun 2018 sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Bengkayang tahun 2015 dengan dominasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Hal tersebut mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan potensi kekayaan di provinsi tersebut baik pada kabupaten dengan pendapatan asli daerah tertinggi maupun terendah.

Selanjutnya, sumber pendapatan asli daerah yakni pendapatan pajak daerah diperoleh dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bahan galian golongan C serta lainnya yang termasuk dalam pajak daerah. Kemudian pendapatan asli daerah lain yang sah meliputi jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, pendapatan dan pengembalian, serta lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah lain yang sah. Dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan dan kesadaran pajak di Kalimantan Barat telah terlaksana dengan sangat baik sehingga mendominasi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Selain melalui pajak, upaya peningkatan pendapatan asli daerah lain ialah dengan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana yang telah diketahui, Kalimantan terkenal dengan slogan '*paru-paru dunia*'. Slogan tersebut memberikan kesempatan emas bagi penduduk untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang ada. Pemanfaatan potensi tersebut tentunya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang produktif dan kreatif yang dapat digali melalui program pemberdayaan dan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta pengaruh yang signifikan dari pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang dibarengi oleh peningkatan serapan anggaran yang berhubungan dengan tingkat keefektifan dan kedayagunaan pengalokasian anggaran yang belum terdistribusi secara baik melalui APBN maupun APBD.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Amalia et al (2015) dan Rusmita (2016) yang menyatakan pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat belanja daerah. Lain halnya dengan Putra & Dwirandra (2015) ; Devita et al (2014) ; Masdjojo & Sukartono (2009), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

**Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah**

Berangkat dari hasil pengujian, dapat diketahui bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat dalam periode 2015-2019. Dengan meningkatnya dana bagi hasil tidak dibarengi dengan peningkatan belanja daerah. Dana bagi hasil merupakan komponen dari dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana bagi hasil berasal dari pendapatan pajak maupun non pajak oleh daerah dan pusat (Masdjojo, N & Sukartono, 2009). Tidak adanya signifikansi dana bagi hasil terhadap belanja daerah disebabkan oleh belum terciptanya keoptimalan dana transfer baik pajak maupun nonpajak untuk mendanai kebutuhan daerah yang telah dianggarkan dalam RAPBD. Pada penelitian ini, dana bagi hasil tertinggi terdapat

di Kabupaten Ketapang tahun 2015 yakni sebesar Rp 148.397.055.963 dengan tingkat pendapatan Rp 121.939.003.550,84. Angka tersebut menunjukkan tingkat dana bagi hasil lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan. Artinya, pemerintah daerah Kabupaten Ketapang lebih berfokus pada peningkatan dana bagi hasil daripada penerimaan. Jika hal ini terus-menerus dilakukan tentunya akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat dana bagi hasil menandakan adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam menjalankan wilayah otonomnya. Seyogyanya, dengan adanya dana bagi hasil menekankan pemerintah daerah membangun wilayah otonomnya dan mensejahterakan penduduk melalui pengelolaan kekayaan daerah secara kompeten dan seimbang. Permasalahan ketergantungan tersebut perlu di eliminir dengan menjalankan langkah-langkah strategis untuk menggali dan memaksimalkan potensi yang dimiliki yakni dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

Penelitian ini didukung oleh Masdjojo, N & Sukartono (2009) dan Putra & Dwirandra (2015) mengenai dana bagi hasil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah. Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan Dewi et al (2017), dalam pengamatannya menunjukkan tidak adanya pengaruh yang positif dari Dana bagi hasil terhadap tingkat belanja daerah.

### **Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah**

Hasil analisis variabel terakhir yakni jumlah penduduk menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat belanja daerah. Artinya semakin besar jumlah penduduk di Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat akan semakin besar pula anggaran belanja daerah untuk menuju kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik. Pada penelitian ini, tingkat jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Sambas dengan tingkat belanja daerah yang tinggi pula. Hal ini menandakan adanya pengaruh jumlah penduduk terhadap alokasi anggaran belanja daerah dalam membiayai pembangunan fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan beberapa fasilitas lain. Namun sangat disayangkan tingkat pendapatan asli daerah tidak menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan kabupaten lain. Hal ini menandakan bahwa perlunya peningkatan kreativitas dan produktivitas penduduk guna menunjang kemandirian ekonomi dan kesejahteraan hidup. Merujuk dari data LKPD Kabupaten Sambas pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni indikator keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, pada daerah ini tergolong sedang yaitu sebesar 67,02 poin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan peningkatan mutu sumber daya manusia yang dibarengi pengendalian jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur sehingga laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan mengalami peningkatan.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al (2020) mengungkapkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan penelitian dari Devita et al (2014) menghasilkan kesimpulan, belanja daerah tidak dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana bagi hasil (DBH) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Kedua, secara parsial Jumlah penduduk (JP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Ketiga, secara simultan Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat agar lebih memaksimalkan potensi sumber daya yang ada guna meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan penduduk sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dapat siasati dengan mengadakan program pemberdayaan keterampilan manusia, mutu pendidikan yang tinggi dan akuntabilitas kebijakan publik.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu jumlah sampel yang digunakan hanya 8 kabupaten, sedangkan di provinsi Kalimantan Barat terdapat 14 kabupaten/kota. Kemudian variabel bebas yang digunakan untuk riset ini hanya 3 variabel dan masih ada beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat belanja daerah. Rekomendasi bagi peneliti lain, diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan variabel bebas yang lebih bervariasi.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmaddien, I., & Bambang, S. (2020). *Eviews 9 Analisis Regresi Data Panel*. In M. Mirnawati (Ed.), *Ideas Publishing*. Ideas Publishing.
- Amalia, W. R., Wahyudin, N., & M, N. (2015). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan (2009 – 2013). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.171>
- Amirullah. (2015). Populasi dan Sampel. *Bayumedia Publishing Malang*, 67–80. <https://doi.org/10.1007/BF00353157>
- Andarsari, P. R. (2016). *Laporan keuangan organisasi nirlaba (lembaga masjid)*. 143–152.
- Bahl, R., & Sally, W. (2006). Fiscal decentralization and fiscal equalization within regions: the case of Russia. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 18(1), 1–5.
- Bawono, A., & Shina, A. F. I. (2018). *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi dengan Eviews*. (LP2M) IAIN Salatiga.
- Devita, A., Arman, D., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2, 63–70.
- Dewi, K. R., Putu, K., & Ni, L. G. N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 7(1), 180–188.
- Elsye, R. (2013). *Desentralisasi Fiskal* (1st ed.). ALQAPRINT Jatinagor.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP ( Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44–52.
- Gio, P. U. (2015). *Belajar Olah Data dengan EViews*. USU Press.
- Hardati, P. (2013). Forum ilmu sosial. *Forum Ilmu Sosial*, 40(2), 178–188.

- 
- Inawati, Y., Muhammad, S. A., Pandu, N. W., Nailis, S., & Yusvita, N. A. (2021). Analisis Determinan Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–13.
- Inayati, N. I., & Doddy, S. (2017). *Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah*. 1(80), 220–239. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i2.2062>
- Jin, Y., & Mark, R. (2020). Does fiscal decentralization promote economic growth? An empirical approach to the study of China and India. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-11-2019-0174>
- Krinichansky, K. V., & Bruno, S. S. (2019). Financial Development and Economic Growth in Russia. *Emerald Publishing*, 1–28. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-265-820191001>
- Kusuma, H. (2013). *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 1–11.
- Mantra, ida B. (2003). *demografi umum*. 63–77.
- Martani, D., & Fazri, Z. (2011). Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas terhadap pengendalian intern pemerintah daerah studi kasus di indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, 1–27.
- Masdjojo, N. G., & Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *TEMA*, 6(ed 1), 32–50. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Mooy, P. C. A., & Yuliasuti, R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 197. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Onofrei, M., & Florin, O. (2017). Fiscal Decentralisation and Self-Government Practices: Southern versus Eastern Periphery of the European Union. In *Core-Periphery Patterns Across the European Union*. <https://doi.org/10.1108/978-1-78714-495-820171009>
- Purnomo, A. K. (2019). Pengolahan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM SPSS. In B. Daz & A. R. Fitri (Eds.), *Jakad Publishing*. Jakad Publishing.
- Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 811–827.
- Putri, R. L., Nirwanto, N., Assih, P., & Darmawan, W. (2020). *The Importance of Regional Original Income , Balance Fund and Demography on Flypaper Effect through the Regional Government Expenditure*. 7(2), 33–45.
- Rahmawati, N. I. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah ( Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah )*. 1–29.
- Ramadhani, F., & Theresia, W. D. (2020). Konvergensi ifrs, kualitas audit, dan manajemen laba. *Akuntansi Bisnis & Manajemen*, 27(1), 1–19.
- Rasyid, M. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(5), 68–80.
- Rizkiyanti, S. (2016). *Pengaruh Ekspor, Investasi, dan Produktivitas Terhadap Pertumbuhan di Sektor Primer dan Sekunder Indonesia Periode 2005-2014*. Digital Repository Universitas Jember.

- Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3), 237. <https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19083>
- Sarwono, J. (2011). Mengenal Path Analysis: Sejarah, Pengertian Dan Aplikasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Ukrida*, 11(2), 98454.
- Setyowati, L. (2014). *Kausalitas Granger Antara PDRB dengan Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 1990-2011*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudarsono, A. (2016). Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Memprediksi Laju Pertumbuhan Penduduk Menggunakan Metode Bacpropagation (Studi Kasus Di Kota Bengkulu). *Jurnal Media Infotama*, 12(1), 61–69. <https://doi.org/10.37676/jmi.v12i1.273>
- Sumawan, W. I., & I, M. S. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Kinerja Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1727–1754.
- Suryowati, K. (2016). Analisis Pseudoinvers dan Aplikasinya Pada Regresi Linear Berganda. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) Yogyakarta, 1979-911X(November)*, 550–558.
- Tahar, A., & Maulida, Z. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(1), 88–99.
- Utami, R. M., & Arif, D. (2018). Pengaruh DER, ROA, ROE, EPS dan MVA Terhadap Harga Saham Pada Indeks Saham Syariah Indonesia. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 206–218.